

SEJARAH PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI PERIODE 1960-1980

Iin Andriani¹, Benhard Kuriawan Pasaribu¹, Diana²

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: upmfakultaspsikologi@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: benhardkpasaribu.untagsmda@gmail.com

³ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: fisipolupmf@gmail.com

ABSTRACT

The problem of the low quality of a nation's human resources is a manifestation of the inability of the quality assurance system to work effectively. The study of quality assurance in higher education in the period 1950-1970s was not as popular as it is today, but the basic concept of the importance of quality in education had begun to be pioneered. This era was characterised by ensuring minimum standards were achieved. Quality assurance emphasised aspects such as lecturer qualifications, physical facilities, and curriculum. It aims to ensure that students get a quality education through the provision of resources that focus on the inputs and processes of education, as well as efforts to ensure the availability of adequate educational facilities and infrastructure.

Keywords: Quality Assurance, Education Quality, Higher Education, Human Resources

ABSTRAK

Problem rendahnya mutu SDM suatu bangsa merupakan wujud dari belum mampunya sistem penjaminan mutu bekerja secara efektif. Studi penjaminan mutu pendidikan tinggi pada periode 1960-1980-an belum sepopuler sekarang, namun konsep dasar tentang pentingnya kualitas dalam pendidikan sudah mulai dirintis. Era ini ditandai dengan memastikan standar minimum tercapai. Penjaminan mutu lebih menekankan pada aspek-aspek seperti kualifikasi dosen, fasilitas fisik, dan kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan sumber daya yang fokus pada input (masukan) dan proses pendidikan, serta upaya untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Mutu Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemampuan perguruan tinggi menghasilkan lulusan berkualitas secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing bangsa dalam persaingan antar bangsa. Mutu lulusan (*output*) membutuhkan komitmen dan kesadaran dari setiap perguruan tinggi sebagai penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Kesadaran akan pentingnya mutu sudah sejak lama tumbuh dan berkembang di berbagai negara. Di Amerika Serikat misalnya, sebagaimana diungkapkan oleh Freeman (dalam Becker, 1993: 17), telah memunculkan perbincangan serius diantara mereka tentang kualitas Sumber Daya Manusia. Kecenderungan perbincangan mereka berubah menjadi apakah United State (USA)

menyiapkan atau menyediakan kualitas dan kuantitas yang memadai dari penyelenggaraan pendidikan yang ada? Bonus demografi dari manusia terdidik (*over educated Americans*) disadari mereka akan menjadi daya saing dalam menghadapi persaingan global antar bangsa di dunia sehingga investasi dalam pendidikan menjadi faktor penting dan mutu layanan pendidikan menjadi prasyarat utamanya.

Konsep penjaminan mutu bukanlah hal yang baru, namun berbagai terminologi dan metodologi yang sekarang digunakan untuk mendefinisikan, mengembangkan dan menerapkannya, relatif baru. Ada banyak sekali persepsi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kualitas dalam pendidikan tinggi. Berbagai definisi telah diusulkan, namun belum ada kesepakatan yang dapat dicapai. Kriteria kualitas yang paling banyak diterima secara luas dalam pendidikan tinggi mungkin adalah “kesesuaian dengan tujuan”. Konsensus tentang hal ini tidak menyelesaikan masalah tentang apa yang dimaksud dengan kualitas dalam pendidikan tinggi: ini hanya membawa diskusi selangkah lebih jauh ke pertanyaan “apa tujuan pendidikan tinggi?”. Namun, hal ini sangat membantu, karena untuk sebagian besar pendapat yang berbeda tentang tujuan pendidikan tinggi, yang berada di balik berbagai konsep yang berbeda tentang apa yang harus dimaksud dengan kualitas dalam pendidikan tinggi.

Pendekatan yang berbeda terhadap kualitas mencerminkan konsepsi yang berbeda tentang pendidikan tinggi itu sendiri. Beberapa tinjauan umum tentang teori-teori terkini dan praktek-praktek dalam sistem mutu nasional disajikan dalam bab tiga. Konsepsi kualitas telah dikategorikan dengan cara yang berbeda, menunjukkan perspektif yang berbeda dan menjelaskan berbagai aspek.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur yang melibatkan seluruh teknik pengumpulan data berupa sumber literature, mencatat, memahami, mengelola, analisis dan fokus kepada pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dimulai dari meninjau hasil penelitian yang relevan, kemudian mengevaluasi abstrak dari penelitian untuk menentukan relevansi permasalahan penelitian. Peneliti sebagai instrumen penelitian mampu menangkap dan mengevaluasi makna dari interaksi diferensial yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengkuantifikasi hasil jawaban dengan angka, tetapi menggunakan kata-kata

PEMBAHASAN

Pada tahun 1960-an, Penjaminan Mutu (*Quality Assurance/QA*) dalam pendidikan tinggi, meskipun tidak diformalkan seperti saat ini, terutama difokuskan untuk memastikan institusi memenuhi standar dasar melalui pengawasan pemerintah dan akreditasi sukarela. Periode ini menyaksikan munculnya QA sebagai sebuah konsep, terutama dalam konteks ekspansi pasca perang dan kebutuhan untuk menunjukkan kualitas institusi.

Pada tahun 1970-an, Penjaminan Mutu (*Quality Assurance/QA*) dalam pendidikan tinggi terutama difokuskan pada pembentukan struktur dan proses dasar. Era ini merupakan awal dari pendekatan sistematis untuk memastikan kualitas pendidikan, yang melampaui metode ad-hoc. Aspek-aspek utama termasuk mendefinisikan standar, menerapkan prosedur evaluasi, dan mengembangkan mekanisme untuk umpan balik dan perbaikan. Fokusnya

adalah menciptakan kerangka kerja untuk akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan di dalam institusi. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci:

1. **Penetapan Standar dan Tolok Ukur:**

Tahun 1970-an menandai periode dimana institusi pendidikan tinggi mulai secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kualitas dalam program dan layanan mereka. Hal ini melibatkan penetapan standar untuk kurikulum, pengajaran, penilaian, dan sumber daya.

2. **Pengembangan Prosedur Evaluasi:**

Untuk menilai apakah standar-standar ini telah dipenuhi, berbagai metode evaluasi diperkenalkan. Hal ini mencakup penilaian mandiri oleh lembaga, tinjauan sejawat, dan penggunaan penilai eksternal untuk mengukur kinerja.

3. **Penekanan pada Umpan Balik dan Perbaikan:**

Pada tahun 1970-an, semakin banyak yang menyadari bahwa QA bukanlah suatu kegiatan yang hanya terjadi sekali saja, melainkan suatu proses yang berkelanjutan. Institusi mulai secara aktif mencari umpan balik dari mahasiswa, fakultas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

4. **Langkah awal menuju Penjaminan Mutu Internal:**

Ketika sistem penjaminan mutu internal yang komprehensif masih berkembang, tahun 1970-an meletakkan dasar untuk hal ini dengan mendorong institusi untuk membangun mekanisme mereka sendiri untuk memantau dan meningkatkan kualitas.

5. **Kerangka kerja QA awal:**

Dekade ini menyaksikan munculnya kerangka kerja dan pedoman QA awal, yang sering kali dikembangkan di tingkat nasional atau regional, untuk memberikan arahan dan konsistensi bagi institusi.

Upaya Awal Penjaminan Mutu pada periode tahun 1970-an, Sebagian besar berfokus pada:

1. **Standar Minimum:**

Pemerintah dan lembaga pendidikan mulai menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti kualifikasi dosen, fasilitas, dan kurikulum.

2. **Akreditasi:**

Meskipun belum komprehensif saat ini, akreditasi mulai dikenal sebagai salah satu cara untuk menilai dan menjamin mutu perguruan tinggi.

3. **Peningkatan Kualitas Dosen:**

Program pelatihan dan pengembangan dosen mulai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Pendidikan tinggi di Asia Tenggara pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagian besar terdiri dari sertifikasi teknis dan kejuruan yang dilakukan oleh organisasi profesional Inggris baik dengan penyedia biaya pendidikan lokal atau melalui pembelajaran jarak jauh. Organisasi profesional Inggris pertama kali melakukan transfer kredit dan perjanjian kembar lintas batas pada tahun 1980-an dan 1990-an, mensponsori program pendidikan tinggi asing di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura (Knight & Morshidi, 2011).

Selama periode ini, wilayah ini mengalami peningkatan populasi dan permintaan yang terus meningkat untuk pendidikan tinggi. Welch (2012) menegaskan bahwa keterbatasan dana publik memaksa pemerintah di Malaysia, Indonesia, dan Filipina untuk memprivatisasi atau meliberalisasi sektor pendidikan tinggi mereka. Pada periode tahun 1950-1970 an kondisi pendidikan Indonesia menghadapi tiga masalah besar, yaitu: (1) mutu pendidikan yang masih rendah, (2) sistem pembelajaran yang masih belum memadai, dan (3) krisis moral yang melanda masyarakat.

Aspek-aspek Utama QA pada tahun 1950-1970an:

Pengawasan Pemerintah:

Di banyak negara, pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan peraturan untuk institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal infrastruktur, rasio mahasiswa dan staf, dan persyaratan numerik lainnya.

Akreditasi Sukarela:

Sistem akreditasi sukarela, seperti JUAA Jepang, muncul sebagai cara bagi institusi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas dan standar.

Fokus pada Standar Minimum:

Penekanannya sering kali pada memastikan institusi memenuhi persyaratan dasar, seringkali numerik, daripada penilaian komprehensif terhadap kualitas pendidikan.

Berbagai perkembangan konsep tentang pengembangan mutu di atas, menyadarkan akan pentingnya penjaminan mutu pendidikan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah penjaminan mutu dalam tiga bentuk tersebut efektif menjamin mutu lulusan atau keluaran perguruan tinggi di Indonesia?

Pendidikan tinggi memiliki fungsi yang sangat strategik dalam peradaban dan kebudayaan manusia, yaitu sebagai pusat kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan merupakan kekuatan moral masyarakat. Pendidikan tinggi menjadi daya gerak (*driving force*) yang dinamis dalam proses modernisasi, serta menghubungkan keadaan sekarang dengan masa depan, dan mengusahakan penemuan arah modernisasi menuju pembangunan masyarakat masa depan. Kondisi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pendidikan tinggi dikelola dengan baik dan sehat.

Meskipun ada banyak perubahan, masyarakat yang sangat menuntut masih mengharapkan Perguruan Tinggi untuk bekerja dengan baik dalam keterbatasan mereka. Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang: "Pendidikan tinggi tidak pernah sepenting sekarang ini bagi negara berkembang. Pendidikan tinggi tidak dapat menjamin pembangunan ekonomi yang cepat, tetapi kemajuan yang berkelanjutan tidak mungkin terjadi tanpanya" (*Task Force on Higher Education and Society*, 2000). Demikian pula, meningkatnya pendaftaran, penurunan pengeluaran pendidikan tinggi, ekspansi yang cepat dari sektor pendidikan tinggi swasta, peningkatan persaingan, dan tekanan globalisasi telah mendorong pengenalan sistem QA formal di Afrika (Shabani, 2013). Hal ini menyulitkan mahasiswa untuk menilai kualitas perguruan tinggi secara efektif. Sektor universitas di Afrika mampu merebut kembali peran sentralnya dalam pembangunan pada pergantian abad, setelah mengalami penurunan pada tahun 1980-an karena realokasi sumber daya dari universitas ke tingkat pendidikan yang lebih rendah (Jowi & Sehoole, 2017).

KESIMPULAN

Penjaminan mutu (quality assurance) merupakan proses kolektif yang dilakukan universitas sebagai sebuah jaminan institusi akademik yang menjaga kualitas proses pendidikan sesuai

standar yang ditetapkan sendiri. Era 1970-an menjadi awal dari perkembangan studi penjaminan mutu pendidikan tinggi. Meskipun belum sekompleks saat ini, upaya-upaya awal telah dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan melalui fokus pada input dan proses, serta upaya untuk mencapai standar minimum. Perkembangan selanjutnya membawa perubahan paradigma dan munculnya sistem penjaminan mutu yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R. M. (2021). Commensuration of the globalised higher education sector: how university rankings act as a credential for world-class status in China. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 51(6), 920–938.
- Altbach, P. G. (2013). Globalisation and forces for change in higher education. *The international imperative in higher education* (pp. 7–10) Brill.
- Arifuddin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 3(1).
- Bancin, A. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1).
- Cheng, M. W. (2018). The Southeast Asian higher education space: transnational, international, or national in new ways? *European Educational Research Journal*, 17(6), 793–808.
- Cowen, R. (2009). The transfer, translation, and transformation of educational processes—and their shape-shifting? *Comparative Education*, 45(3), 315–327.
- Jowi, J.E. and C.T Sehole. (2017). Knowledge and Change in African Universities (pp.121-138)
- Knight, J and Morshdi Sirat. (2011). The complexities and challenges of regional education hubs: Focus on Malaysia. *Higher Educational*. 62(5):593-606
- Nuraeni A , Astri Lindasari, Risma Rahmawati, Siti Nur Aida Amalia, Abdul Kholik. (2025). Analisis Transformasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023. *Karimah Tauhid*, 4(6):3756-3773
- Siram, R. (2015). Manajemen Penjaminan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi. *Jurnal: Ilmu Pendidikan*, 21(1)
- Sholeh, M. I., Idawati, K., Rohani, I., Toryib, M. P., Al Ayyubi, I. I., Ali, H., & Syafi'i, A. (2024). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Manajemen Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Penelitian. *Tarbawi Ngabar: Journal of Education*, 5(2), 196–221.
- Spencer, Barbara A. (2014). Model of Organization and Total Quality Management: A Comparison and Critical Evaluation. *"The Academy of Management Review"*. Vol 19 (3) July, p419-829.
- Welch. A. (2012). The limits of regionalism in Indonesian higher education. *Asian Education and Development Studies* Vol. 1 No. 1, 2012 pp. 24-42.